

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK STUDI KASUS STASIUN TAWANG (PERDA KOTA SEMARANG NO. 3 TAHUN 2013)

Oleh:

Juniaman Alexander S, Drs. Zainal Hidayat, M.A

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Email: anandarifqi@gmail.com

ABSTRAK

Merokok berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia, sehingga menghambat pembangunan dibidang kesehatan. hal ini menjadi dasar pemerintah Daerah Kota Semarang untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang no. 3 tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang no. 3 tahun 2013 yang membahas tentang kawasan tanpa rokok serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang no. 3 tahun 2013 ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan arsip. Hasil-hasil penelitian dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus penelitian dan mengerucut pada permasalahan utama yang ingin dijawab pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian PERDA pelaksanaan kebijakan ini dinilai sudah cukup berhasil akan tetapi masih kurang optimal meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai Stasiun Tawang itu sendiri maupun oleh penumpang yang berada di Stasiun Tawang.

Dari hasil penelitian, kendala yang ada dijumpai seharusnya diperbaiki secepatnya, ditemukan pendukung implementasi yang harus dipertahankan. Kejelasan tentang adanya peraturan daerah kota Semarang tentang kawasan tanpa rokok serta pemberitahuan yang dilakukan lewat media perlu untuk dipertahankan jika perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : **Implementasi Kebijakan, Komunikasi, dan Disposisi**

ABSTRACT

Smoking is bad for human health, so as to hinder development in the health sector. This became the basis the regional government of Semarang city to make a policy governing concerning Limited Smoking Area As stated in the regulation of Semarang no. 3 year 2013. The purpose of this research is to know and to analyze the implementation of the regulation of Semarang no. 3 year 2013. To discuss concerning Limited Smoking Area regulation as well as the factors that influence on the based on the monitoring regulation of Semarang no. 3 year 2013. The method used in this research are deskriptive is a procedure to provide the data or information about in a qualitative studies, data obtained from the interview observation, and archive institute. Research results that are relevant to the problem via reduksi in a qualitative analysis, surveyed the data in accordance with the basic research and mengerucut to focus on the main issues on the answer to this.

The research results show that in the implementation regulations the implementation of this policy is considered to be quite successful however still less than optimal nevertheless there are some positive change that is felt by officials in station good tawang itself and by passengers who are at the station tawang

Based the research result, There are obstacles that found supposed to be repaired as soon as possible, found a supporter of the implementation of has to be defended. Clarification on the city Semarang establishment of regulation concerning the region Limited Smoking Area as well as from the notification conducted through the media need to maintained if needs to be improved

Keywords : *policy implementation, communication, disposition*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang berfungsi produktif secara sosial dan ekonomi (Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013, pasal 1 ayat 4). Salah satu hal yang dapat merusak kesehatan adalah rokok. Karena rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Bab I Pasal 1 ayat 3). Zat-zat asing berbahaya tersebut adalah zat yang 4000 zat kimia yang terdapat dalam sebatang rokok, 43 diantaranya tergolong zat yang berbahaya

misalnya : *hidrogen sianida (HCN)*, *arsen*, *amonia*, *polonium*, dan *karbon monoksida (CO)*. Menurut peraturan Daerah Kota Semarang no. 3 Tahun 2013, daerah – daerah yang berada dalam kategori seperti :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan,
2. Tempat proses belajar mengajar,
3. Tempat anak bermain,
4. Tempat ibadah,
5. Angkutan umum,
6. Tempat kerja,
7. Tempat umum,
8. Tempat lainnya yang ditetapkan,
9. Tempat tertutup.

Semua hal di atas, dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Hal ini berarti di daerah-daerah tersebut masyarakat tidak diperbolehkan merokok dengan bebas. Peraturan ini dibuat tentu dengan maksud untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Semarang itu sendiri. Para perokok aktif dibatasi intensitas mereka dalam menghisap atau menggunakan rokok, karena mereka tidak bisa lagi dengan bebas merokok di sembarang

tempat. Oleh sebab itu, berlandaskan pasal diatas terkhusus pasal 1 ayat 16. Salah satu bentuk angkutan umum yang dimiliki Kota Semarang adalah Stasiun kereta api yakni Stasiun Tawang. Di Stasiun Tawang memiliki jumlah penumpang yang relatif banyak perharinya, mengingat Stasiun ini merupakan salah satu stasiun besar yang dimiliki Kota Semarang.

Realita yang ada, jelas bahwa peraturan ini kurang mendapat respon positif dari masyarakat umum. Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kesehatannya sendiri dan juga terhadap adanya peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa rokok merupakan faktor yang menjadikan peraturan ini kurang dapat diimplementasikan dengan baik. Ditambah lagi partisipasi masyarakat untuk ikut menyukseskan implementasi Peraturan Daerah Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dikatakan kurang optimal, tingginya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat sangat diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat yang awalnya merokok di sembarang tempat menjadi perilaku yang tertib terhadap peraturan dengan merokok hanya di kawasan untuk merokok. Atas atas dasar uraian di atas, maka peneliti merasa penting untuk diteliti, sebagai judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013)”**

B. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan serta menjelaskan bagaimana Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok studi kasus Stasiun Tawang
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam proses

implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2013 tentang kawasan Tanpa Rokok ini di Stasiun Tawang.

C. Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (Pasolong, 2007: 8), administrasi publik merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi Publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

2. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Kuhn (1970) dalam Yeremias (2008:31), paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik itu sendiri adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing – masing dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan (Riant, 2009: 50).

4. Implementasi Kebijakan

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul (wahab, 2011 : 45) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pulak berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya,

keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kedudukan teori dalam penelitian ini adalah sebagai pedoman untuk meneliti Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang. Teori – teori yang diungkapkan oleh Grindle, W. Hogwood dan Lewis A. Gun, Mazmanian dan Paul A. Sabatier, George C. Edwards III dijadikan pedoman untuk meneliti implementasi kebijakan yang ada. Dengan adanya teori, kita semakin mudah untuk melakukan penelitian, karena teori memberikan penjelasan tentang fenomena yang terjadi

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif
2. Fokus dan Lokus Penelitian
Pada penelitian ini fokusnya adalah Implementasi Kebijakan Perda Kota Semarang no. 3 Tahun 2013, sedangkan lokusnya adalah Kawasan Stasiun Besar Tawang Semarang Jl. Taman Tawang no.1
3. Informan Penelitian
Penelitian ini menggunakan informan yakni. penumpang Stasiun Tawang serta pejabat stasiun Tawang terkait dengan pelaksanaan
4. Jenis Data
Penelitian ini menggunakan data berupa teks, kata-kata tertulis yang menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.
5. Sumber data
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang

diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara atau pengamatan langsung/observasi. Kemudian data yang diperoleh bisa dicatat atau direkam.

Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data :

1. Interview (wawancara)

Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, agar penulis bebas untuk menanyakan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan data dan informasi. Sehingga tidak ada batasan untuk penulis dalam menggali informasi

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berupa data-data berupa gambar, dokumen resmi, data-data resmi yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang

3. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi dan media yang berkaitan dengan program sanitasi perkotaan khususnya sektor persampahan

7. Analisis interpretasi data

Penelitian ini melakukan proses kegiatan analisis data :

1. Reduksi data

Diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data
Kumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun dalam penelitian ini lebih menekankan pada bentuk pengujian yang bersifat deskriptif.

3. Conclusion Drawing/ verification
Berdasarkan data-data yang diperoleh, peneliti mencoba mengambil kesimpulan dari kesimpulan yang kabur menjadi jelas, karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan mengenai data tersebut.

8. Kualitas data
Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013)

a. Petugas pengawas kawasan tanpa rokok.

Petugas pengawas kawasan tanpa rokok yang tersedia baik Satpol PP kota Semarang dan Stasiun Tawang masih dapat dikatakan kurang memadai, dimana pegawai Stasiun Tawang sebanyak 70 pegawai dengan jumlah penumpang perhari di Stasiun Tawang sebanyak 5000 jiwa, otomatis perbandingan petugas terhadap penumpang 1 : 71 jiwa (digenapkan), Dari hasil ini dapat dilihat bahwa petugas yang terlibat dalam pengawasan sangatlah kurang. Senada dengan jumlah petugas personil Satpol PP yang sebanyak 262 jiwa mengingat jumlah penduduk Kota Semarang

sebanyak 1.572.247 jiwa, otomatis perbandingan dengan personil Satpol PP 1 : 6000 jiwa (digenapkan).

b. Dana

Ketersediaan dana untuk melakukan pengawasan maupun dalam pengadaan sarana dan prasarana juga memberi andil penting. Dana yang digunakan petugas Satpol PP kota Semarang untuk pengawasan berasal dari anggaran bagi hasil pajak rokok dari pemerintah daerah dan itupun bisa dikatakan dana yang ada terbatas. Sedangkan bagi Stasiun Tawang, dana mengeluarkan dana sekitar 20 juta dan di Stasiun Tawang ada empat buah, jadi total 80 juta rupiah. dana tersebut harus diambil dari dana operasional perusahaan, dana ini digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana *smoking area*

c. Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok

Dinas Ketersediaan sarana dan prasarana adalah ketersediaan ruang atau tempat area khusus bagi perokok (*smoking area*) dan tempat tersebut sebaiknya penempatannya juga tepat sehingga dapat berfungsi dengan baik. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting demi keberhasilan isi tujuan kebijakan Perda Kota Semarang no Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, prasarana berupa tempat khusus perokok dirasakan sudah sangat cukup di Stasiun Tawang. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi saya sendiri selaku peneliti. Dimana terdapat empat tempat yang disediakan yakni, Selatan, Barat, Utara dan Timur. Satu tiap sisinya. Area khusus perokok sangatlah penting. Dengan adanya area khusus perokok, Begitu juga dengan pihak Satpol PP sudah menyediakan berupa penempatan tulisan kawasan tanpa

rokok dan penempatan advetorial di surat kabar. diharapkan para perokok aktif tidak lagi merokok di sembarang tempat. Sehingga lingkungan dan udara di Stasiun Tawang juga menjadi lebih bersih

d. Kewenangan

Sikap pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai pelaksana Perda Kota Semarang no. 3 Tahun 2013 dirasa sudah baik. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak merokok di sembarang tempat. Selain itu personil Satpol PP melakukan razia, setelah razia dilakukan mereka yang tertangkap sedang merokok di sembarang tempat akan didata dan kemudian hari apabila terzaring lagi baru di berikan sanksi. Sikap yang tegas akan mempengaruhi keberhasilan implementasi. Dengan adanya ketegasan dari aparat pelaksana diharapkan masyarakat dan penyedia tempat umum akan ikut dalam keberhasilan implementasi peraturan tersebut. Sejauh ini Satpol PP hanya untuk menimbulkan efek jera, kegiatan operasi penertiban akan dilaksanakan secara terus menerus dan selanjutnya untuk pelanggaran berulang akan diterapkan sanksi pidana sesuai yang tercantum dalam Perda. Begitu juga di Stasiun Tawang, apabila berada dalam Stasiun apabila ketahuan hanya terlebih dahulu ditegur itu, berbeda jika di atas kereta api, jika ketahuan merokok di kereta akan ditegur dan dicatat, apabila tetap tidak mengindahkan, mau tidak mau pihak kita menurunkannya di stasiun selanjutnya. Jadi masih belum optimal untuk para perokok yang merokok di sembarang tempat, mengingat memang dari sisi peraturannya juga menginstruksikan seperti itu.

2. Faktor pendukung dan penghambat

Dari wawancara yang telah dilakukan maka faktor pendukung dan penghambat yakni :

a. Komunikasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis masih menemukan belum optimal, di sisi kejelasan sebenarnya sudah baik, akan tetapi di sisi transmisinya belum optimal. Dari penelitian dapat diketahui bahwa penyaluran informasi masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kurang komunikasi yang terjalin. Pihak penumpang menginginkan adanya pemberitahuan secara langsung dari pemerintah agar khalayak umum mengetahui. Mereka ingin ada kejelasan bukan hanya sekedar tahu dari tempat mereka berada tentang peraturan tersebut. Dilain pihak pemerintah merasa bahwa pemberitahuan melalui media sudah cukup.

b. disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan Perda ini di Stasiun Tawang sudah tegas dalam melaksanakan tugasnya. karena di kantor ini perokok merokok diarea khusus. Para pegawai khususnya satpam tidak segan menegur penumpang ketahuan merokok sembarangan.

Disisi lain memang kurangnya koordinasi antara pemerintah, Satpol PP Dan Stasiun Tawang juga menjadi penyebab implementasi pergub kurang maksimal. Disisi pemerintah dengan adanya pergub ini diharapkan tempat umum dan terkhusus Stasiun Tawang bisa terlaksana, tetapi disisi stasiun tawang juga masih minim pegawai, dan untuk Satpol PP hanya mengadakan koordinasi dengan operasi yustisi sebulan sekali

c. Perubahan Perilaku

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dari kebijakan Perda Kota Semarang adalah perubahan perilaku

masyarakat yang semula merokok di sembarang tempat menjadi merokok di area yang sudah ditentukan. Selain itu perubahan perilaku dari penyedia tempat yang semula tempat umum tidak memiliki area khusus perokok dengan adanya Perda tersebut diharapkan menjadi memiliki area khusus merokok. Para perokok sebenarnya sudah berusaha untuk berhenti merokok. Hal ini dibuktikan dengan mulai ada pembatasan jumlah rokok yang dihisap atau bahkan mereka sudah bisa tidak merokok selama bulan puasa. Namun alasan mereka untuk tidak merokok bukan karena adanya peraturan tersebut, melainkan karena alasan individu seperti mereka berpuasa atau menghormati orang yang berpuasa, alasan ekonomi karena harga rokok dan kebutuhan lainnya cukup mahal ataupun alasan kesehatan.

Pada umumnya mereka sadar bahwa merokok dapat merusak kesehatan, tetapi mereka sulit untuk berhenti, hal ini dikarenakan faktor lingkungan tempat dimana mereka berada. Para perokok mengenal rokok biasanya dari teman yang menawarkan, begitu pula jika mereka ingin berhenti, biasanya mereka merasa tidak enak jika ditawari rokok mereka menolaknya. Selain itu merokok adalah suatu kebiasaan sehingga jika tidak merokok mereka merasa ada sesuatu yang kurang. Secara tidak langsung mereka sudah tergantung pada rokok dan hal ini yang sulit untuk dihilangkan. Selain itu jika ada perokok yang merokok di area khusus, mereka merokok di area khusus bukan karena kesadaran pribadi, tetapi karena keterpaksaan adanya teguran jika merokok di sembarang tempat. Para perokok dapat merokok leluasa di area khusus merokok

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013)

Berdasarkan penelitian di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang dapat disimpulkan pelaksanaan kebijakan ini dikatakan sudah berhasil akan tetapi masih kurang optimal meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai Stasiun Tawang itu sendiri maupun oleh penumpang yang berada di Stasiun, udara menjadi lebih segar, begitu juga terhadap penumpang yang memang tidak merokok yang berkurangnya polusi udara akibat paparan asap rokok, berkurangnya sampah yang berserakan akibat rokok. Hal ini tentunya membawa manfaat bagi masyarakat pengunjung aspek segi kesehatan. Kurang optimalnya implementasi Perda Kota Semarang Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Stasiun Tawang dapat dilihat dengan menggunakan model kebijakan Sabatier dan Mazmanian dimana kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi beberapa factor yaitu sumber daya, komunikasi, sikap pelaksana dan perubahan perilaku. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan juga keberadaan Perda ini memberikan dampak berarti di pengunjung. Suatu peraturan ditetapkan untuk kepentingan bersama. Hendaknya suatu peraturan ditetapkan dapat memberi dampak positif juga bagi masyarakat. Perda tersebut sudah ditetapkan, masyarakat mulai tertib dalam merokok dan tidak merugikan orang lain, berdasarkan dari analisa yang dilakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa :

1. Petugas pengawas kawasan tanpa rokok

Keterbatasan sumber daya baik petugas yang jumlahnya terbatas karena jumlah pegawai Stasiun Tawang dan Satpol PP dianggap kurang untuk melakukan pengawasan secara merata. Saat ini pemerintah Kota Semarang hanya melibatkan 262 personil Satpol PP dalam setiap operasi yang dilakukan di seluruh wilayah Kota Semarang.

2. Dana

Dalam penerapan Peraturan Daerah ini, seharusnya Stasiun Tawang ini bisa mendapatkan dana bagi hasil pajak rokok dari pemerintah Kota Semarang seperti yang dikatakan pihak Satpol PP dalam dana pengawasan untuk penegakan kebijakan ini.

3. Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok

Untuk Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok memang sudah memadai di Stasiun Tawang, dikarenakan memang sudah terdapat empat buah tempat merokok bagi yang hendak merokok. Hal itu merupakan sangat menunjang keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok ini.

4. Kewenangan

di Stasiun Tawang, apabila berada dalam Stasiun apabila pengunjung kedatangan merokok hanya terlebih dahulu ditegur. berbeda jika di atas kereta api, jika ketahuan merokok di kereta akan ditegur dan dicatat, apabila tetap tidak mengindahkan, mau tidak mau pihak kita menurunkannya di stasiun selanjutnya. Jadi masih belum optimal untuk para perokok yang merokok di sembarang tempat, mengingat memang dari sisi peraturannya juga menginstruksikan seperti itu.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Komunikasi

Pengawasan oleh personil Satpol PP yang hanya dilakukan sesekali saja menyebabkan peraturan ini berjalan kurang konsisten atau berkelanjutan. Kurangnya komunikasi secara langsung juga menjadi penyebab implementasi peraturan kurang berjalan dengan baik. Komunikasi yang berjalan konsisten atau berkelanjutan dapat mensukseskan implementasi Perda Kota Semarang no 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Disposisi

Ketegasan aparat pelaksana diperlukan agar masyarakat segan untuk melanggar peraturan. Memang dalam kenyataannya, aparat dirasa kurang tegas dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini ditunjukkan dengan pelanggaran hanya berupa peneguran.

3. Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku merupakan hal yang diharapkan dari suatu peraturan. dalam implementasinya penumpang di stasiun sudah melaksanakan peraturan ini, dan pihak stasiun Tawang sudah menyediakan area khusus untuk para perokok.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang dijumpa di lapangan, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat membantu keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang no 3 Tahun 2013. Berikut ini adalah beberapa saran yang diberikan oleh penulis :

1. Kurangnya personil yang ada dapat ditutupi dengan penambahan jumlah personil Satpol PP dan dalam Stasiun Tawang juga menambah pegawai khusus untuk penanganan rokok, bukan hanya dilimpahkan kepada satpam semata.

2. Keterbatasan dana yang ada di Stasiun tawang ditutupi dengan pembagian hasil pajak rokok daerah. Begitu juga terhadap mereka yang melanggar. Denda yang terkumpul nantinya akan masuk kas negara dan dapat digunakan untuk biaya operasional dalam operasi pengawasan
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yaitu berupa area khusus untuk perokok ditutupi sekat, biar memang agar udara langsung tidak tercemar. Dan membuat penunjuk arah ke tempat merokok / smoking area.
4. Razia perokok yang masih merokok di tempat umum hendaknya lebih sering dilakukan oleh Satpol PP dan dilakukan secara berkala dan terus – menerus agar peraturan ini dapat ditegakkan. Sikap aparat diharapkan bisa lebih tegas bukan hanya peneguran dalam melakukan tugasnya.
5. Perubahan perilaku yang belum optimal, oleh sebab itu hendaknya dipupuk kesadaran masyarakat untuk tidak lagi merokok di sembarang tempat. Selain itu diberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa merokok di sembarang tempat bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan banyak orang.
6. Dari kendala – Kendala yang ada dijumpai seharusnya diperbaiki secepatnya, ditemukan pendukung implementasi yang harus dipertahankan. Kejelasan tentang adanya peraturan daerah kota Semarang tentang kawasan tanpa rokok serta pemberitahuan yang dilakukan lewat media perlu untuk dipertahankan jika perlu ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006 *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung
- Dwidjodjo, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Alex Media Komputindo
- Dunn,William N.2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta :Gajah Mada University Press
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Surakarta: Pustaka Cakra
- L.P. Sinambela. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Maleong, Lexy J.2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Komputindo
- Prastowo. 2012. *Analisis data dan reduksi data*. Yogyakarta:Penerbit Gava Media.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta
- Suwitri, Sri(2011).*Konsep Dasar Kebijakan Publik*.Semarang: Badan Penerbit Uniersitas Diponegoro.
- Wahab, Abdul Solichin. (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang:

*UPT Penerbitan Muhammadiyah
Malang.*

Winarno,Budi.2008.Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Jakarta: Media Pressindo (edisi revisi)

Winarno,Budi.2011. Kebijakan Publik: Teori,Proses,dan Studi Kasus, Yogyakarta:CAPS